

DARI MEMORIA PASSIONIS KE FORERI: SEJARAH POLITIK PAPUA 1999-2000

I Ngurah Suryawan

Fakultas Sastra, Universitas Negeri Papua, Manokwari

Research Fellow Indonesian Young Leaders di Universitiet Leiden, Netherlands

ngurahsuryawan@gmail.com

ABSTRACT

This paper focuses on Papua memory of suffering in the tragedies of violations against humanity (memoria passionis) under the authority of the Indonesian Government with brutal military actions. Memoria Passionis was also a foundation of social movement in the urban people of Papua in 1999-2000. FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya – Forum of the Irian Jaya People’s Reconciliation) and PDP (Presidium Dewan Papua- Papuan Presidium Council) were educated local elites who struggled for Papua freedom peacefully. FORERI then transformed into Tim 100 who met President Habibie in February 1999 with the claim that the people of Papua wanted independence (separation) from Indonesia. They carry out MUBES (Great Council) of Papuan people on 23 to 26 February 2000 and the Papuan Congress II from May to June 2000. Consolidation of democracy and social movement in Papua ended after Theys Hiyo Eluay, one of the leaders of PDP was killed by Indonesian Army in 2001.

Keywords: Papuan, memoria passionis, social movement, local elites

ABSTRAK

Makalah ini berfokus pada memori Papua orang tentang penderitaan dalam tragedi pelanggaran terhadap kemanusiaan (Memoria Passionis) di bawah kewenangan Pemerintah Indonesia dengan tindakan militer yang brutal. Memoria Passionis juga adalah dasar dari gerakan sosial di masyarakat perkotaan Papua pada 1999-2000. FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya) dan PDP (Presidium Dewan Papua) merupakan elite berpendidikan lokal berjuang kebebasan Papua dengan damai. FORERI kemudian bertransformasi menjadi Tim 100 yang bertemu Presiden Habibie pada Februari 1999 dengan tuntutan bahwa rakyat Papua menuntut kemerdekaan (memisahkan diri) dari Indonesia. Mereka melaksanakan MUBES (Musyawarah Besar) Rakyat Papua 23-26 Februari 2000 dan Kongres Rakyat Papua II Mei-Juni 2000. Konsolidasi demokrasi dan gerakan sosial di Papua berakhir setelah Theys Hiyo Eluay, salah satu pemimpin dari PDP dibunuh oleh Angkatan Darat Indonesia pada tahun 2001.

PENDAHULUAN

Heterogenitas etnik yang tinggi, kebudayaan dan kompleksitas adat serta gerakan sosial di tanah Papua memiliki sejarah yang kompleks dan penuh dengan ketegangan dan konflik. Terdapat lebih dari 253 etnik dengan bahasa, struktur sosial, tradisi, sistem kepercayaan/agama, dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Komplek-

sitas persoalan di Tanah Papua terjadi seiring dengan sejarah peralihan kekuasaan-kekuasaan. Salah satu momen penting pentas kekuasaan terhadap tanah Papua terjadi pada tahun 1940-an hingga 1960-an. Saat itu terjadi Perang Dunia II yang berimpikasi kepada proses penyerahan kedaulatan Belanda atas Indonesia termasuk di dalamnya Papua. Proses peralihan kekuasaan di Papua berujung kepada Penentuan Pen-

dapat Rakyat (Pepera) Juli-Agustus 1969 yang menyatakan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, sejarah Papua setelah 1969 menunjukkan bahwa hasil Pepera itu justru menjadi salah satu akar konflik yang berkepanjangan.

Sepanjang pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1969, Papua menjadi salah satu objek pembangunan tanpa rekognisi yang memadai pada kompleksitas sejarah dan budaya Papua. Salah satu diantaranya dalam bentuk penyeragaman desa berdasar Undang-Undang Desa Nomor 5 Tahun 1979 dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan komersial. Pemaksaan-pemaksaan nilai terjadi melalui pendidikan, birokrasi bahkan melalui lembaga-lembaga keagamaan. Catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dikenal secara internasional dalam intensitas yang tinggi. Berita mengenai Papua sarat dengan kisah-kisah mengenai gerakan-gerakan perlawanan untuk merdeka dan protes pelanggaran hak asasi manusia. Pasca reformasi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran daerah semakin mewarnai pergolakan kekuasaan terhadap tanah Papua.

Artikel ini memfokuskan untuk melihat sejarah politik Papua pada tahun 1999-2000 ketika zaman kebangkitan gerakan-gerakan memperjuangkan aspirasi kemerdekaan rakyat Papua berlangsung di seluruh bumi Cenderawasih, yang sering disebut dengan *Papuan Spring* atau *Renaissance Papua* (Timmer, 2007; ICG, 2001). Momentum pasca reformasi 1998 di Indonesia dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan aktivis Papua urban di kota-kota Papua untuk mengkonsolidasikan gerakan-gerakan kemerdekaan yang dikenal dengan GERASEM (Gerakan Aspirasi

Merdeka). Artikel ini juga memberikan perhatian terhadap ingatan kekerasan dan penderitaan (*memoria passionis*) yang menjadi salah satu sumber dari gerakan-gerakan aspirasi kemerdekaan rakyat Papua sepanjang tahun 1999-2000.

Memoria Passionis: Ingatan Kekerasan dan Penderitaan

Dalam tesisnya, John Giyai (2010: 91-92; Giay, 2000: 9) menyebutkan bahwa *memoria passionis* adalah suatu ingatan masa lalu yang tak bisa lupa dari ranah kehidupannya karena pengalaman suatu peristiwa yang menyakitkan fisik maupun psikis dan ceritanya diingat oleh generasi ke generasi. Rentetan peristiwa kemanusiaan (*violence*) seperti inilah yang menjadi ingatan penderitaan kolektif bagi bangsa Papua. Sejarah kekerasan itulah yang disebut dengan *memoria passionis* dengan mengambil istilah dari seorang teolog Johan Baptist Metz. *Memoria passionis* mengacu pada kenangan akan trauma akibat kekerasan terbuka dan marginalisasi sosial dan ekonomis secara umum.

Metz mengungkapkan, apabila saya memandang *memoria passionis* sebagai satu-satunya kategori universal mengenai kemanusiaan, saya tidak berpikir tentang suatu ingatan yang hanya menguatkan dan mendukung identitas kita (sebagai pihak yang menang dan beruntung), tetapi sebaliknya ingatan yang mempertanyakan identitas kita yang telah terbangun dan dijaga ketat oleh kita yang maju dan menang. Ingatan ini adalah suatu ingatan yang berbahaya, ia melemahkan seseorang, ia membuka satu sisi kehidupan. Ia adalah peringatan yang tidak mau menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk kita menjadi lebih agresif, tetapi merenung-

kan nasib mereka yang menderita pada masa lampau. Di mana saja tradisi dan ingatan masa lalu diangkat secara serius, tradisi dan ingatan itu selalu amat berbahaya terhadap mereka yang memiliki tradisi dan ingatan itu, karena mereka menuntut pertobatan dan transformasi. Ingatan itu harus kritis dan subversif sebagai oposisi terhadap *status quo* keadaan sekarang untuk membebaskan masyarakat dari kesadaran diri dan kutukan satu dimensi yang dibangun oleh kelompok yang dominan, sehingga tradisi ini digunakan sebagai potensialitas yang kritis dan membebaskan. Jadi sangatlah jelas bahwa masa lalu korban kekerasan negara inilah yang sering diabaikan yang kemudian menjadi perhatian dari refleksi teologi Metz. Masa lalu yang dibicarakan di sini tidaklah kosong, namun mengutip Walter Benjamin, masa lalu adalah masa yang penuh dengan penderitaan karena berisi kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman penindasan (Metz, 1999 dalam Giay, 2006: 24-25).

Metz mengungkapkan untuk menggumuli kekerasan dan penderitaan masa lalu dari masyarakat dalam "sejarah sunyi" tersebut, beberapa perspektif yang perlu dijadikan pedoman dalam "gerakan sosial" dari masyarakat adalah; memandang *memoria* (ingatan) mereka yang menjadi korban tidak lagi sebagai hiasan atau pelengkap atau sebagai "kekalahan" dan sikap menarik diri dari realitas. Selanjutnya adalah membangun kesadaran akan proyek keadilan dan keselamatan terhadap identitas komunitas yang terancam yang belum diselesaikan. Dalam hal ini, masyarakat (dan gereja) membangun solidaritas dengan mereka sebagai korban kekerasan untuk bersama-sama mengaktualisasikan dirinya maupun perjuangannya untuk menyelamatkan masa lalu dan merehabilitasi identitasnya.

Gerakan sosial di Tanah Papua adalah proses kesadaran melawan budaya lupa dan upaya "menyelamatkan masa lalu". Masa lalu yang trautamis dan penuh dengan penderitaan dihadirkan ke masa kini, agar masa lalu yang hilang dimakan "kelupaan" itu dapat diselamatkan. Tujuannya untuk mengingatkan kepada semua pihak, utamanya penguasa, untuk menyelesaikan tugasnya untuk membawa kesejahteraan dan menyebar kedamaian serta keadilan yang belum pernah diwujudkan hingga kini.

Farhadian (2007) dalam proyeknya tentang *Kisah-kisah Hidup Tokoh Papua: Kesaksian Mereka yang Ditindas* mengajukan betapa pentingnya menghadirkan kesaksian-kesaksian orang Papua sebagai korban dan pejuang dari tragedi kemanusiaan dan penderitaan di tengah kekuatan kapitalisme global yang mengepung Tanah Papua. Namun, di tengah situasi dunia yang mengglobal menyerang kampung-kampung di Tanah Papua, suara-suara rakyat Papua seolah ditelan dengan kisah-kisah kesuksesan investor menanamkan modalnya dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat Papua. Akan tetapi, mungkin kisah-kisah itu adalah palsu dan kebohongan semata. Suara-suara rakyat Papua tenggelam oleh kekuatan-kekuatan ahli strategi pembangunan dan perusahaan-perusahaan *eco-tourism* yang terus-menerus mempromosikan alasan mereka dengan mengeksploitasi "keterbelakangan" rakyat Papua dengan menyebutkan "penduduk asli jaman batu yang terisolasi" untuk memaparkan secara pejoratif penduduk asli.

Berdasarkan kepada kesaksian iman Kristen yang membimbing dan menguatkan perjuangan kisah-kisah hidup tokoh-tokoh Papua ini, Farhadian (2007:vii) mengungkapkan bahwa kesaksian yang berarti menceritakan ke-

benaran tentang suatu persoalan, apakah di pengadilan hukum atau di dalam konteks religi. Pengadilan hukum menjadi hukum moral kesadaran orang-orang yang memiliki itikad baik di dalam komunitas dunia. Konteks religi yang menjadi perjuangan rakyat Papua untuk melibatkan lingkungannya sebagai penganut Kristen. Ketika orang bersaksi, ia akan mengaitkan pernyataan-pernyataan sebagai saksi mata peristiwanya. Kekuatan kesaksian berada di dalam fakta bahwa kata-kata para saksi didasarkan pada pengetahuan pribadi, langsung dan disuarakan di dalam orang pertama tunggal.

Oleh karena itulah, narasi-narasi kesaksian rakyat Papua berada di tengah-tengah proses penundukan dan pengabaian yang dilakukan oleh negara. Pada kesaksian inilah kita akan menemukan bagaimana iman dan pengalaman-pengalaman religi dan kemanusiaan memberikan harapan, semangat, dan keberanian untuk melawan penindasan dan kekejaman yang mereka hadapi. Narasi dan kesaksian-kesaksian rakyat Papua akan mencerminkan suatu yang sangat rumit (*complicated*) yang mencerminkan kehidupan orang-orang Papua hari ini. Orang-orang Papua secara kultural adalah orang Melanesia, sebagian besarnya penganut Kristen, dan berada di tengah salah satu negara muslim terbesar di dunia. Kehidupan orang-orang Papua mencerminkan sebuah campuran ranah sosial, kultural, politik, dan religius sekaligus.

Konstruksi kebudayaan Papua yang “terkebelakang” dan “primitif” dipropagandakan oleh beberapa majalah internasional dan juga majalah-majalah Indonesia serta brosur-brosur wisata. Mereka inilah yang mengambil keuntungan dari citra-citra rakyat Papua yang dipublikasikan mengenakan koteka, memegang busur dan anak panah. Penggambaran ini memberikan

kesan bagi prasangka dan sikap kasar dan juga bagi realitas rakyat Papua kini yang samar. Penyajian identitas rakyat Papua yang bersuku-suku sangat berkontribusi pada ilusi bahwa orang-orang Papua adalah orang primitif dan membutuhkan bimbingan seperti anak-anak. Inti dari semua persoalan tersebut adalah orang-orang Papua ingin mengatur dirinya sendiri.

Proses keterdesakan rakyat Papua salah satunya disebabkan karena program transmigrasi yang perlahan tapi pasti meminggirkan rakyat Papua oleh para pendatang yang didukung oleh pemerintah dan kekuasaannya. Rakyat Papua adalah orang-orang yang membentuk mayoritas hampir 2,2 juta penduduk yang tinggal di belahan barat kepulauan New Guinea. Tapi dengan program transmigrasi oleh pemerintah Indonesia, perpindahan penduduk melebihi hampir satu juta jiwa ke Tanah Papua. Mayoritas utama para transmigran ini secara ras berbeda dari rakyat Papua yang adalah orang-orang Melanesia. Sebagian besar pendatang ini juga tidak memiliki keimanan utama penduduk Papua yaitu Kristen dan animisme. Selama beberapa dekade pemerintah pusat di Jakarta, yang menggunakan kebrutalan militer dan polisi, memaksa rakyat Papua keluar dari tanahnya sendiri. Teror dan intimidasi ini biasanya dilakukan tanpa kompensasi untuk membuka jalan bagi komunitas-komunitas transmigran. Level pendidikan dan keterampilan para pendatang baru yang lebih tinggi dan disukai oleh pemerintah dengan cepat meminggirkan rakyat Papua. Perbedaan budaya dan iman rakyat Papua dengan para pendatang juga menguatkan sikap rasis mereka.

Selama bertahun-tahun komunitas internasional dalam bentuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah negara lain termasuk Amerika

Serikat, berkonspirasi di dalam kebijakan Papua dari Pemerintah Indonesia di Jakarta dengan menyediakan hibah dan pinjaman yang besar untuk mendanai transmigrasi dan menyokong keluarga-keluarga transmigran dengan kesehatan, pendidikan, benih tanaman, dan sertifikat tanah gratis. Sekalipun program transmigrasi formal telah dihentikan, para migran "sukarela" terus berdatangan dan justru sangat massif.

Kegagalan Jakarta menyediakan layanan kesehatan, pendidikan dan layanan dasar lainnya kepada rakyat Papua, khususnya di wilayah pedalaman yang menjadi tempat bermukim rakyat Papua, menunjukkan bahwa marginalisasi rakyat Papua telah menjadi kebijakan kelalaian yang disengaja dan telah mengurut akar. Ketiadaan layanan kesehatan bisa diartikan sebagai "hukuman mati" yang perlahan-lahan bagi rakyat Papua. HIV/AIDS dibawa masuk oleh militer Indonesia yang menjalankan atau melindungi lingkaran pelacuran yang menyebabkan penularan HIV/AIDS di Tanah Papua menjadi yang tertinggi.

Rakyat Papua juga menjadi korban langsung dari pendatang baru lainnya yaitu perusahaan-perusahaan multinasional raksasa yang masuk dengan silih berganti ke Tanah Papua. Perusahaan raksasa global ini masuk ke Tanah Papua seringkali melalui kesepakatan-kesepakatan rahasia yang sangat korup di Jakarta, yang dari bisnis gelap yang korup itu Presiden Soeharto dengan keluarga dan kroni-kroninya mendapatkan keuntungan yang luar biasa selama lebih dari 30 tahun. Eksploitasi asing terhadap sumberdaya alam di Tanah Papua yang sangat besar secara legal dan tentunya sangat banyak yang illegal terus berlangsung hingga hari ini tanpa henti. Freeport McMoran Cooper & Gold, Inc yang dimiliki oleh Amerika Serikat mengontrol operasi

pertambangan tembaga dan emas yang terkenal dan terbesar di dunia. Freeport Indonesia telah mulai beroperasi di tahun 1967, sebelum aneksasi Jakarta melalui kesepakatan dengan mantan Presiden Soeharto.

Freeport Indonesia telah menimbulkan polusi di sebagai besar pantai selatan Papua dengan menggunakan sistem sungai buatan untuk membuang jutaan ton *tailing* (sisa olahan pertambangan). Perusahaan ini meratakan bentangan luas daratan hutan dan menghancurkan pohon sagu penduduk asli yang menjadi makanan pokok penduduk local. *Tailing* itulah yang kini telah mencapai laut dan karena arus pasang sepanjang pantai menyebabkan tersebardan merusak hutan bakau pelindung pantai. Freeport telah memaksa penduduk lokal angkat kaki tanpa kompensasi, meracuni air dengan asam sisa pertambangan, dan mengeksploitasi pekerja Papua selama bertahun-tahun.

Pembayaran di Jakarta dan ke pihak militer dan polisi untuk menjaga keamanan menyebabkan Freeport merasa mendapatkan kebebasan. Selain itu, pembajakan liar dan operasi-operasi perikanan seringkali dilindungi oleh militer dan polisi Indonesia, dan untuk beberapa kasus bahkan dimiliki oleh pasukan keamanan tersebut. Praktik inilah yang telah merampok rakyat Papua dari sumberdaya alamnya yang berlimpah. Ini diperparah lagi dengan prostitusi dan alkohol yang dibawa masuk militer ke Papua telah memberi keuntungan dan juga merongrong resistensi rakyat Papua terhadap keputusan sepihak Jakarta. (Edmund McWilliams dalam Farhadian, 2007: xi-xiii)

"Jiwa yang patah" adalah istilah dari John Rimbiak, pembela hak-hak asasi manusia Papua dan salah satu putra terbaik yang dimiliki bangsa Papua untuk menggambarkan bagaimana isi hati, harkat, dan jati diri rakyat Papua

untuk membebaskan dirinya telah dirampas oleh berbagai tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan negara dan kekuasaannya (baca: Indonesia). Mereka mengalami “Jiwa yang Patah” (hilang percaya diri, frustrasi, apatis, mengendapkan dendam dan kebencian yang mendalam terhadap pihak yang membuat mereka menderita). Secara sosial, rakyat terpecah belah dan saling tidak percaya satu sama lain. Suatu kenyataan yang, selain berbagai faktor lainnya, juga melatar-belakangi mengapa rakyat Papua saat ini menuntut untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Dalam sebuah essaynya yang inspiratif, John Rumbiak menulis dengan tajam, “Penjajahan didukung oleh teori-teori kebudayaan yang rasialis. Kaum penjajah beranggapan bahwa kelompok masyarakat yang dijajah tidak berkebudayaan atau kebudayaannya rendah dan oleh karena itu berbagai kebijakan dilakukan untuk memperadabkan sekaligus menaklukkan kelompok masyarakat tersebut.” Ia mengutip tokoh Pembebasan Frantz Fanon, seorang psikiater asal Caribia yang kemudian mendukung perjuangan bangsa Aljazair dari penjajahan Perancis. Hal yang sama juga dilihat John Rumbiak dalam konteks penjajahan Indonesia terhadap bangsa Papua Barat.

Selain kompleksitas sejarah dan manipulasi status politik, ingatan kekerasan dan penderitaan adalah persoalan akut dan paling membekas dalam sejarah kekerasan dan ingatan penderitaan rakyat Papua. Ingatan sosial kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui aparat TNI/Polri diwariskan secara turun-menurun tumbuh menjadi “ingatan penderitaan bangsa Papua” dan dasar gerakan sosial pembebasan bangsa Papua. Namun, ingatan penderitaan ini

ditutupi oleh rezim otoritarian negara. Ingatan sosial kekerasan dan penderitaan rakyatnya adalah sebuah ancaman serius yang distigma “separatis”, “terkebelakang”, “barbar” dan “tidak berbudaya” untuk membenarkan tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Memori subyektif rakyat Papua tentunya menjadi ancaman serius bagi stabilitas “keamanan dan ketertiban” yang dibangun negara. Setiap rezim otoriter/totaliter senantiasa memandang memori sebagai ancaman serius. Sebab, memori yang diartikulasikan secara publik bisa membuat segala bentuk kekerasan politik yang dilakukan rezim itu menjadi tampak telanjang. Itulah sebabnya rezim yang demikian senantiasa berusaha membungkam atau memutar-balikkan memori tentang kejahatan atas kemanusiaan. Dengan teknik pengendalian ingatan semacam ini, penguasa melakukan normalisasi kebohongan, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kebohongan itu diterima sebagai “kebenaran. (Budiawan, 2004)

Di Tanah Papua, sudah menjadi pemandangan umum bahwa aparat TNI/Polri akan jauh melebihi guru-guru dan tenaga kesehatan. Sekolah-sekolah dan Puskesmas akan tampak lengang karena kekurangan tenaga atau meninggalkan tugas, sementara aparat keamanan dan pos-pos penjagaan tidak terhitung jumlahnya. Wilayah-wilayah dimana kehadiran TNI dan/ atau Polri amat dominan biasanya rentan mengalami konflik dan bentrokan antara rakyat, gerakan perlawanan, dan aparat keamanan. Wilayah itu mencakup wilayah perbatasan RI-PNG, jalur pegunungan Tengah (Paniai sampai Pegunungan Bintang), wilayah-wilayah yang memiliki eksploitasi sumber alam yang kaya seperti Teluk Bintuni dan Timika.

Rentetan panjang sejarah pelanggaran berat HAM telah mendorong

masyarakat Papua untuk menamai perasaan dan pengalaman tak dilindungi dengan istilah genosida. Istilah ini sebenarnya adalah istilah hukum HAM internasional dari Konvensi PBB tentang Genosida tahun 1948 untuk menamai kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling serius setara dengan kejahatan perang. Intinya adalah tindak kejahatan yang secara sengaja dan terencana berniat membasmi sebagian atau seluruh kelompok masyarakat, suku, ras atau agama. Meski secara teknis hukum, genosida yang berkembang di Papua belum memenuhi syarat-syarat yang amat ketat terutama mengenai motif dan kebijakan negara serta jumlah korban, tetapi inti perasaan dan terlebih pengalaman tak terlindungi makin hari makin kuat.

Hak hidup orang Papua makin sulit dijamin ditambah lagi jumlahnya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia. Kini perbandingan antara pribumi dan pendatang hampir sama, yakni 58% : 42%. Umumnya, pendatang menguasai sektor ekonomi menengah ke atas dan secara geografis, mendiami wilayah perkotaan; sementara pribumi Papua umumnya tidak memiliki akses ke sektor ekonomi/bisnis serta lebih banyak tinggal di wilayah pedalaman. Perasaan dan pengalaman terpojok, tersudut, dan tak terlindungi inilah yang menjadi sumber gerakan perlawanan rakyat Papua. (Hernawan, 2006)

Dalam sejarah Indonesia, pada zaman pemerintah Soeharto, Provinsi Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga beberapa kali terjadi Operasi Militer yang dilakukan oleh ABRI atau sekarang disebut TNI. Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia menempatkan TNI dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua dan dilakukan operasi besar-besaran terjadi dan menewaskan rakyat Papua dalam jum-

lah besar. Operasi Militer yang dimaksudkan adalah Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1967-1969), Operasi Pamungkas (1969-1971) Operasi militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984) dan Operasi Sapu Bersih (1985), Operasi Militer di Mapnduma (1996). Kemudian jalan kekerasan setelah pemberlakuan Otonomi Khusus adalah pelanggaran HAM di Wasior (2001), Operasi militer di Wamena (2003) dan di Kabupaten Puncak Jaya (2004) (Tebay, 2009:2; Giyai, 2010: 91)

John Rumbiak secara periodik menuliskan bagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan “perang” melawan bangsa Papua sejak 1963 dengan serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI/Polri. Saya akan kutip secara utuh bagaimana periode-periode penindasan terhadap rakyat Papua dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Periode 1963 - 1969 adalah masa transisi di mana sesudah kedaulatan Papua Barat, berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 1962, dilimpahkan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia dan persiapan menuju ke apa yang disebut “*Act of Free Choice*” pada tahun 1969. Pada masa ini pemerintah dan angkatan bersenjata Republik Indonesia memasukkan ribuan aparat keamanan dan petugas-petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua Barat menjadi bagian integral dari Republik Indonesia bilamana *Act of Free Choice* terjadi. Rakyat diintimidasi, terjadinya penangkapan dan penahanan di luar hukum, pembunuhan-pembunuhan. Akibatnya hanya 1025 saja dari total 800.000 rakyat Papua waktu itu yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia untuk secara terpaksa memilih menjadi bagian dari Ne-

gara Kesatuan Republik Indonesia.

Periode 1970–1984 adalah periode perlawanan rakyat Papua yang memprotes hasil *Act of Free Choice* dalam bentuk berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjustifikasi berlangsungnya operasi-operasi militer di wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai kantong-kantong gerakan OPM. Ribuan pasukan militer diturunkan di wilayah-wilayah tersebut, kebebasan rakyat dipasung dan pembantaian terhadap rakyat pun digelar. Operasi-operasi militer tersebut antara lain: Kasus Biak (1970/1980); Kasus Wamena (1977) dan Kasus Jayapura (1970/1980). Kasus 1984 di mana Arnold C. Ap dan Eduard Mofu, dua seniman Papua dibunuh dan 12 000 penduduk kemudian mengungsi ke Papua New Guinea.

Periode 1985 – 1995 mencatatkan bagaimana operasi militer untuk menumpas OPM terus dilancarkan aparat keamanan, terutama di kawasan pegunungan tengah Papua Barat. Dari semua peristiwa yang terjadi 'Kasus Timika 1994/1995' yang melibatkan PT. Freeport Indonesia yang dilaporkan Keuskupan Gereja Katolik Jayapura di mana 16 orang dibunuh, 4 orang hilang dan puluhan lainnya ditahan dan disiksa serta 5 perempuan ditahan dan diperkosa.

Periode 1996 – 1998 kembali dilakukan operasi militer menumpas OPM pimpinan Kelly Kwalik yang menyandera para ilmuwan barat di wilayah Mapnduma, Pegunungan Tengah Papua Barat dalam jangka waktu 1996 – 1998. Menurut ELSHAM Papua Barat (Mei 1998), drama penyanderaan ini menjadi alasan bagi pihak militer Indonesia untuk kemudian melancarkan operasi militer baik pada masa penyanderaan, operasi pembebasan sandera dan pasca pembebasan sandera di mana sekitar 35 penduduk sipil dibunuh, 13 perempuan

diperkosa, 166 rumah penduduk dan 13 gereja (Gereja Kemah Injil Indonesia) dibakar musnah.

Periode 1998 – 2000 adalah masa tumbangnya kekuasaan otoritarian rezim Suharto. Namun di Tanah Papua pada bulan Mei 1998 berbagai tindak kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat Papua Barat yang melakukan hak kebebasan berekspresi dengan berdemonstrasi dan mengibarkan bendera Papua Barat (Bintang Fajar) di berbagai kota di Tanah Papua.

Nasionalisme Papua dan Benih Gerakan Sosial Urban: Politik Papua 1999-2000

Melihat begitu maraknya pelanggaran HAM di Tanah Papua, maka hadirilah Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua yang menjadi jawaban atas situasi kekerasan kemanusiaan yang begitu massif. Konflik dan kekerasan yang terjadi di Tanah Papua, telah mendorong terjadinya rangkaian pelanggaran HAM secara sistematis dan meluas di Papua. Meningkatnya eskalasi kekerasan yang disertai dengan pelanggaran HAM, telah menimbulkan kekhawatiran terhadap eksistensi orang Papua, termasuk didalamnya upaya penyelesaian konflik secara komprehensif.

Berawal dari diskusi terbatas yang dilakukan oleh beberapa individu yang peduli dengan situasi HAM di Papua, dibentuklah *Irian Jaya Working Group for Justice and Peace (IWGJP)* 1995. Kehadiran IWGJP telah berhasil untuk melakukan monitoring dan investigasi terhadap serangkaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Asmat, Bade dan Tembagapura. Melalui kerja sama dengan ACFOA di Australia, Herman Muninghoff, OFM (Uskup

Jayapura), mengirimkan laporan situasi pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar areal konsesi PT. Freeport Indonesia, tepatnya di kampung Arwanop dan Mbanti. Laporan tersebut menjadi langkah awal dari pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yang sejak tahun 1963, tidak terungkap ke publik.

Memandang pentingnya pemantauan, penyelidikan dan publikasi secara lebih efektif dan kontinyu, maka sejumlah individu bersepakat untuk membentuk lembaga independen yang secara permanen bekerja untuk melakukan advokasi yang lebih intensif terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Akhir 1997, bertempat di Honai Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD), IWGJP memprakarsai pertemuan yang dihadiri oleh beberapa individu seperti: Pdt. Herman Saud, MTh, Uskup Herman Muninghoff. OFM, Zadrak Wamebu, Edison Giay, Barend Rumaikew, John Rumbiak, Aloy Renwarin, Johannes Bonay, Fien Jarangga, Yan C.H. Warinusi, Demianus Waney, Robert Mandosir, Silvester Wogan, Deny Yomaki, Yoseph Bawen dan Ferry Marisan. Pertemuan tersebut kemudian memberikan rekomendasi untuk mendirikan lembaga yang kini dikenal sebagai ELSHAM Papua.

Berlangsungnya kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua inilah yang mengakibatkan tumbuh suburnya gerakan nasionalisme Papua dan menyemaikan gerakan-gerakan sosial baru dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perempuan, organisasi pembebasan Papua, dan gereja di daerah-daerah perkotaan di Tanah Papua. Ruang politik kelompok masyarakat sipil ini terbuka saat reformasi 1998 membuka saluran politik dan aspirasi rakyat Papua.

Masa-masa penting dalam pembentukan identitas ke-Indonesia-an

(1945-1963) sama sekali tidak melibatkan rakyat Papua. Papua juga tidak pernah ikut (diikut-sertakan) dalam peristiwa historis seperti Sumpah Pemuda 1928. Maka konsepsi dan wacana lokal Papua berkembang sendiri untuk jangka waktu lama dan kemudian dibebani pula oleh rezim otoritarian Orde Baru dengan perilaku kekerasan dan diskriminasi terhadap orang Papua. Singkatnya, nasionalisme Papua berkembang dari kesadaran-lokal, kesadaran etnik dan menjadi kental akibat pengalaman pahit dan tragis di bawah Orde Baru.

Dr. Benny Giay, seorang antropolog dan teolog Papua seperti dikutip Santoso (2001) mengungkapkan pada hakekatnya nasionalisme Papua terdiri atas tiga unsur: kesadaran etnik ke-Papua-an; protes besar terhadap Orde Baru; dan protes terhadap permainan dunia luar. Di bawah Orde Baru, untuk pertama kali dalam sejarah, Papua mengalami suatu kolonialisme yang bukan cuma menyerap sumber daya alam ke wilayah lain, tapi juga memperkenalkan pembantaian manusia oleh aparat negara. Itulah pasal pokoknya, kata orang di sini. Dalam kaitan itu, ada permainan dunia internasional terhadap Papua. Yang terakhir ini merujuk pada peranan Belanda, Indonesia, PBB dan Amerika Serikat yang akhirnya melahirkan kompromi Perjanjian New York 1962 dan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Amerika, dengan obsesi Perang Dingin kala itu, membantu Presiden Soekarno menuntut hak atas Irian Barat. Adalah ulah jendral-jendral Orde Baru seperti Ali Moertopo yang tak pernah hormat pada demokrasi dan hak hak bangsa lain, yang kemudian memanipulasi Pepera tersebut, dengan memperdaya 1026 wakil Papua pada 1969. Sekarang, orang Papua tidak mau dipeceundangi lagi.

Sementara gerakan sosial pasca nasionalisme etnik tersebut bertransformasi menjadi gerakan-gerakan sosial berbasis pada LSM dan gereja. Adalah pada tahun 1980 ketika dilakukan diskusi di di Biara APO dan Keuskupan Jayapura. Tujuan dari diskusi itu adalah untuk melihat kemungkinan bagaimana cara mengangkat permasalahan-permasalahan HAM di Papua kepermukaan, termasuk ke tingkat Internasional. Maka terbentuklah KKO (Kelompok Kerja Oikumene) yang kemudian membentuk IRJADISC yang berbasis di lembaga Antropologi Uncen sehingga sangat dekat hubungannya dengan kurator Museum Uncen yaitu Arnold Ap maupun Ketua Lembaga Antropologi Uncen, Dr Daan Ajamiseba. IRJA DISC menjadi lembaga hukum yang solid dengan diberi nama Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa.(YPMD). Tahun 1984, gerakan masyarakat sipil ini dalam situasi yang rumit. Karena Arnold Ap dituduh otak dibalik eksodus 10.000. orang ke Papua New Guinea dan dituding sebagai Menteri Kebudayaan Republik Papua Merdeka dibawah Komando Brigjen Zet Rumkorem. Ia ditangkap oleh Kopasanda, dijebak dan melarikan diri dan dibunuh di Pasir 6. Ini tentu menjadi pukulan yang sangat berat bagi IRJA DISC.

Berita dari kampung pun terbit yang kemudian berubah nama menjadi Kabar Dari Kampung (KDK). KDK selalu diasuh dalam bahasa Indonesia populer dan bahasa Indonesia-Papua. Waktu itu KDK merupakan majalah yang banyak dibaca oleh masyarakat desa dan masyarakat di Papua. Itulah spiritnya Arnold Ap, termasuk yang lainnya yaitu pentingnya mengetahui struktur budaya, sistem budaya, sistem sosial masyarakat diberbagai di Papua sebagai *entripoint* sewaktu introduksi sosial. Tetapi ketergantungan IRJADISC pada Universitas Cenderawasih (Uncen)

itu berat. Uncen mulai takut karena persoalan kritis yang dilontarkan oleh IRJADISC dan YPMD. IRJADISC Uncen kemudian ditinggalkan dan orang-orangnya masuk ke YPMD plus KDK hingga mulai dikenal di luar negeri. Pada tahun itu juga LBH didirikan di Papua. Gereja Katolik dan GKI meminta kepada YLBHI agar LBH didirikan di Papua (Baab dan Mambor, 2011).

Konsolidasi demokrasi bagi elite-elite lokal Papua terbuka saat jatuhnya rezim otoritarian Soeharto 1998. Alternatif yang tersedia adalah bergabung dengan perlawanan bersenjata OPM (Organisasi Papua Merdeka), membangun bentuk perlawanan lainnya atau memilih berjuang di jalur pengasingan. Namun, pada Agustus 1998, selang beberapa pekan setelah dilakukan pembungkaman demonstrasi kemerdekaan di Jayapura, Sorong, Wamena dan Biak, para intelektual, pemuka gereja dan aktivis membentuk Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI). Foreri berupaya untuk mencari peluang bagi orang Papua untuk mengelola masalah mereka sendiri, melalui otonomi, system federal atau kemerdekaan. Ada kesadaran diantara para aktivis di Jayapura khususnya bahwa mereka perlu menjauhkan diri dari OPM setelah peristiwa penculikan Ekspedisi Lorentz pada tahun 1996.

FORERI dengan dukungan tiga gereja terbesar (Gereja Kristen Injil, Gereja Katolik, dan Gereja Kristen Injil Indonesia), pemuka intelektual dan LSM serta sejumlah pemuka adat, muncul sebagai wahana utama bagi cita-cita orang Papua. Foreri menjadi mitra dialog dengan pemerintah Indonesia dalam serangkaian pertemuan-pertemuan informal menuju pertemuan Tim 100 Pemimpin Papua dengan Presiden Habibie pada Februari 1999. 100 anggota delegasi tersebut secara luas mewakili para elite Papua baik secara

geografis maupun latarbelakang social dan agama. Pada pertemuan Tim 100 dan Presiden Habibie inilah Tom Beanal sebagai pemimpin Tim 100 membacakan pernyataan sikap bahwa Irian Jaya ingin memisahkan diri dari Indonesia dan agar dibentuk pemerintahan peralihan di Irian jaya di bawah pengawasan PBB dan bila perlu PBB menjadi bagian dari dialog internasional antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua (ICG, 2001: 11-12)

Pertemuan dengan Presiden Habibie yang dilakukan Tim 100 dan terbentuknya FORERI menjadi babak baru dalam perjuangan demokrasi di Papua. Pertemuan dengan Presiden Habibie menjadi tahapan penting dalam perubahan perlawanan orang Papua dengan munculnya kepemimpinan baru pada kelas menengah urban di perkotaan. Pertemuan tersebut memberikan legitimasi kepada Tim 100 dan memungkinkan diberlakukannya strategi gerakan sosial tanpa kekerasan untuk mencapai kemerdekaan. Lahirnya FORERI juga menunjukkan konsolidasi gerakan masyarakat sipil dan gereja-gereja untuk memperjuangkan hak politik orang Papua.

FORERI sejak November 1999 melalui pemimpin-pemimpinnya (Tom Beanal, Benny Giay, Theys Eluay, dan yang lainnya) melakukan serangkaian pertemuan-pertemuan dengan tujuan utama untuk menggalang dukungan, memantapkan kepemimpinan, dan mengutarakan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah Indonesia dan komunitas internasional. Berbagai pertemuan-pertemuan politik dilakukan untuk memobilisasi massa dan melakukan konsolidasi gerakan social. Ujung dari transformasi gerakan sosial yang dilakukan oleh FORERI adalah terlaksananya MUBES (Musywarah Besar) Papua 2000 pada 23-26 Februari 200 dan Kongres Papua II pada Mei-Juni 2000. Pada

MUBES Papua inilah didirikan PDP (Presidium Dewan Papua) yang menjadi organisasi politik utama dalam perjuangan kemerdekaan Papua.

PDP terdiri atas 22 anggota dengan dua ketua umum dan dua moderator. Sebagai badan eksekutif anggota dewan bertanggungjawab kepada sebuah panel yaitu sebuah badan legislatif terdiri atas 200 wakil dari kabupaten-kabupaten dan masyarakat-masyarakat Papua di luar negeri. PDP mendirikan dirinya sebagai sebuah kepemimpinan kolektif. Presidium memberikan struktur kepemimpinan bagi semua kekuatan yang berlainan yang menghendaki kemerdekaan, selain memberi legitimasi bagi dialog yang tengah berjalan dengan pemerintah Indonesia (ICG, 2001; Alua, 2002, 2002a, 2002b). Akhir dari gerakan PDP adalah ketika pemimpinnya Theys Hiyo Eluay ditemukan terbunuh pada 2001 dan Tom Beanal direkrut menjadi komisaris PT Freeport Indonesia.

Mulai berkembangnya gerakan masyarakat sipil pada 1999-2000 dengan dukungan gereja direspon dengan dingin dan hati-hati oleh pemerintah Indonesia. Catatan yang menarik dilakukan oleh SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian) Jayapura (2001). Gaya penanganan pemerintah sejak 1998 hingga 2000 boleh disebut kebijakan menebar jala. Mula-mula segala ungkapan hati, kejengkelan, demo-demo, reaksi anti militer/ polisi, teriakan Merdeka dibiarkan tanpa ada pelarangan apalagi penangkapan. Seluruh lapisan masyarakat Papua seakan-akan mendapat ruang hidup seluas-luasnya. Tim 100 boleh bertemu dengan Presiden BJ. Habibie. Boleh diadakan Mubes dan Kongres. Boleh dikibarkan bendera Papua dan dinyanyikan lagu "Hai, Tanahku Papua". Boleh didirikan Satgas Papua berikut posko-poskonya. Jala ditebarkan dalam-dalam hingga akhirnya ikan masuk dan jala ditarik. Inilah yang terjadi

dengan instruksi penurunan bendera Papua tanggal 29 September 2000 dari Kapolri yang menjadi gebrakan awal untuk melakukan langkah represi luar biasa.

Terhadap gerakan massa, represi dilakukan dengan begitu mudahnya masyarakat dianiaya, ditangkap, disiksa, dan ditembak mati sedangkan pemimpin-pemimpin rakyat ditahan. Represi ini mendatangkan dampak yang tidak sederhana: (1) kekerasan antar kelompok masyarakat seperti telah terbukti di Wamena (6 Oktober), Merauke (2 Desember); (2) pengungsian baik warga Papua maupun non-Papua; (3) ketakutan yang bersifat sistemik di tingkat masyarakat; (4) kecurigaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat; (5) kebingungan karena kehilangan kepemimpinan; (6) makin menipisnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di segala tingkat. Nada dasar dari semua ini adalah diciptakannya suasana konflik dan kekerasan yang pelan-pelan diidentikkan sebagai ciri perjuangan orang Papua. Semua tindakan ini sangat tidak proporsional mengingat bahwa seluruh perjuangan rakyat Papua dijalankan secara damai; maka sangat sinis bahwa aparat negara hanya tahu menjawab dengan menahan "tokoh-tokoh perjuangan damai", dan hanya tahu turut mengubah suatu iklim damai menjadi suatu iklim kekerasan.

Dalam konteks budaya, masyarakat *dong* juga menjadi korban dengan pemaksaan nilai "keberadaban" yang dilakukan dalam program-program pemerintah. Salah satunya adalah operasi koteka. Identitas kolektif orang asli Papua sebagai sebuah masyarakat yang modern dan beradab dipaksakan melalui program pemerintah tersebut. Tahun 1971-1973, pemerintah Indonesia melaksanakan Operasi Koteka (penutup penis dari sejenis labu, sebagai pakaian tradisional di dataran tinggi di Papua)

yang terdiri atas elemen-elemen Angkatan Bersenjata dan Pemerintah Sipil. TNI/Polri dan aparat birokrasi bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk membuat masyarakat-masyarakat pedalaman Papua beradab dan untuk mengembangkan serta menciptakan kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik, yang akan digunakan untuk pengembangan Papua lebih lanjut, dengan tujuan utamanya menciptakan ide-ide nasional (dalam perspektif Indonesia) yaitu, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Operasi Koteka adalah kampanye militer Indonesia yang bertujuan untuk mempengaruhi orang asli Papua di pegunungan untuk meninggalkan aspek-aspek dari kebudayaan asli mereka, bersekolah, menjadi modern secara ekonomi, dan mengadaptasi identitas Indonesia yang lebih umum. Para pejabat berusaha untuk memaksa masyarakat suku Dani sebagai orang Pegunungan Papua untuk menukar Koteka mereka dengan pakaian bergaya Indonesia. Dengan demikian, strategi memermalukan (*humiliation strategy*) digunakan dalam proses pembangunan di kalangan masyarakat Dani untuk membuat mereka lebih terlibat dalam perubahan sosial. Ketidakberimbangan kekuasaan tercermin dalam persepsi terhadap penduduk asli melalui pelecehan terhadap budaya-budaya tradisional lokal dan melabel budaya tersebut sebagai "terbelakang" dan "tidak beradab". Atas nama pembangunan modern dan kemajuan, strategi memermalukan yang meyakinkan masyarakat atas ketidakberhargaan diri dan budaya mereka tidak berharga sehingga mereka merasakan *inferiority complex* dan dipaksa untuk terlibat dalam perubahan sosial.

Akumulasi keputusan-keputusan penduduk asli Papua dilanjutkan dengan pengabaian hak-hak budaya sebagai

cerminan martabat kolektif mereka. Masyarakat asli Papua merasa martabat dan identitas mereka tidak diakui (contoh: proses yang tidak melibatkan mereka dalam kebijakan seperti program transmigrasi, penolakan pengakuan terhadap tanah ulayat atau wilayah nenek moyang, eksploitasi sumber daya alam, kurangnya kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam administrasi negara, dan sebagainya). Masyarakat asli Papua mengekspresikan kefrustasian mereka yang sudah terakumulasi sejak lama melalui pelbagai demonstrasi damai. (Sugandi, 2008:5-6)

SIMPULAN

Sejarah politik Papua 1999-2000 ditandai dengan terbukanya gerakan-gerakan untuk mengekspresikan tuntutan kemerdekaan. Elite-elite lokal Papua di perkotaan membangun sebuah gerakan sosial masyarakat sipil yang melakukan perjuangan tanpa kekerasan. Berdasarkan ingatan akan kekerasan dan penderitaan (*memoria passionis*) rakyat Papua di bawah pemerintah Indonesia dan keyakinan akan keberbedaan sejarah dengan negara Indonesia, gerakan masyarakat sipil urban ini semakin mendapatkan legitimasinya dengan terbentuknya FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya) pada Agustus 1998. Forum elite-elite lokal Papua urban inilah yang melakukan mediasi dan serangkaian pertemuan-pertemuan yang melibatkan seluruh elemen rakyat Papua untuk berdialog dengan Pemerintah Indonesia. FORERI kemudian bertransformasi menjadi Tim 100 yang bertemu Presiden Habibie pada Februari 1999 dengan tuntutan bahwa rakyat Papua menuntut kemerdekaan (memisahkan diri) dari Indonesia. Sejarah politik Papua 1999-2000 juga di-

tandai dengan gerakan FORERI dan Tim 100 untuk melaksanakan MUBES (Musyawarah Besar) Rakyat Papua 23-26 Februari 2000 dan Kongres Rakyat Papua II Mei-Juni 2000. Dalam momen-momen penting sejarah politik Papua 1999-2000 inilah terbentuk PDP (Presidium Dewan Papua) sebagai organisasi perjuangan politik rakyat Papua untuk kemerdekaan. Namun sejarah politik Papua 1999-2000 dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil melalui FORERI, Tim 100, dan PDP diakhiri dengan kembalinya kekerasan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengakhiri riwayat hidup salah satu pimpinan PDP dan masyarakat adat Papua, Theys Hiyo Eluay. Lingkaran kekerasan dan penderitaan dan ekspresi demokrasi yang didapat rakyat Papua selama 1999-2000 kembali terkubur oleh aksi-aksi kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alua, Agus A. 2002. *Mubes Papua 2000 23-26 Februari : Jalan Sejarah, Jalan Kebenaran*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- . 2002a. *Dialog Nasional Papua dan Indonesia 26 Februari 1999: Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang dan Renungkan Dulu*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- . 2002b. *Kongres Papua 2000 21 Mei- 04 Juni: Marilah Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- . 2006. *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan: Suatu Ikhtisar Kronologis*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Budiawan. 2004. "Sejarah dan Emansipasi Poltik" (resensi buku *Tahun yang Tak*

- Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65: Essay-essay Sejarah Lisan*), Kompas, 24 Juli 2004.
- Fahardian, Charles. 2007. *Kisah-kisah Hidup Tokoh Papua: Kesaksian Mereka yang Ditindas*. Jayapura: Penerbit Deiyai
- “Gerakan Masyarakat Sipil di Papua”, Wawancara Simone Baab dan Victor Mambor dengan George Junus Aditjondro, fokerlsmppapua.org (diakses 10 April 2011)
- Giay, Benny. 1986. *Kargoisme di Irian Jaya*. Sentani: Region Press.
- . 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- . 2008. *Mari Mengambil Alih Kendali Kehidupan: Memperjuangkan Pemulihan Negeri Ini (Kumpulan Renungan Pdt. Benny Giay)*. Jayapura: Penerbit Deiyai.
- Giyai, John Yontinus. 2010. “Resistensi Masyarakat Mimika terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua”, tesis di Program Magister Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana 2010.
- Hernawan OFM, J. Budi. 2006. “Membangun Papua Sebagai Tanah Damai: Sumbangan Gagasan untuk Sinode Keuskupan Jayapura”. *Makalah*. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.
- ICG. 2006. “Bahaya yang Dapat Timbul Jika Menghentikan Dialog”, Update Briefing, Asia Briefing No. 47. Jakarta/Brussels, 23 Maret 2006.
- ICG. 2002. “Sumberdaya dan Konflik di Papua”, Update Briefing, Asia Briefing No. 39. Jakarta/Brussels, 13 September 2002.
- Rumbiak, John. *Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Papua Barat (Demi Persatuan Nasional dan Pembangunan)*, (artikel tanpa tahun), elsahmnewsservice (diakses Januari 2011)
- Salftford, John., 2003, *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969*, London: Routledge Curzon .
- Santoso, Aboeprijadi, 2001, “Bintang Kejora Nasionalisme Etnik Papua Berkembang Alamiah,” Radio Hilversum, 26 Januari 2001.
- Tebay, Neles. 2009. *Dialog Jakarta-Papua Sebuah Perspektif Papua*. Jakarta: SKP Jayapura.
- Timmer, Jaap, 2007, “Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua”, dalam Henk Schulte Nordhold dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625